# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Tinjauan Tentang Kesejahteraan Sosial

### Pengertian Kesejahteraan Sosial

Ilmu kesejahteraan sosial merupakan suatu ilmu terapan yang mengkaji dan mengembangkan kerangka pemikiran serta metodologi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat antara lain melalui pengelolaan masalah sosial, pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat dan memaksimalkan kesempatan anggota masyarakat untuk berkembang. Definisi kesejahteraan sosial menurut Friendlander (1980) yang dikutip dalam Fachrudin (2014;9):Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan institusi-institusi yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok guna mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai dan relasi personal dan sosial sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan sepenuhnya selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat.

Definisi diatas menunjukan bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu sistem yang memberikan pelayanan sosial kepada klien (individu, keluarga, komunitas atau masyarakat). Suatu klien dapat dikatakan sejahtera apabila sudah mencapai standar hidup dengan terpenuhinya sandang, pangan, papan, sosial dan spiritual, selain itu kesehatan yang baik, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya. Adapun definisi kesejahteraan sosial lainnya menurut Suharto (2014:1) sebagai berikut: “Kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi, atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat”.

Berdasarkan dari definisi diatas menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kegiatan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah yang mempunyai tujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan sosial serta untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, individu maupun kelompok sosial.Menurut definisi lain kesejahteraan sosial menurut Huraerah (2011:153) yaitu:

“Kesejahteraan sosial adalah suatu kegiatan atau sekumpulan kegiatan yang ditujukan untuk membantu orang-orang yang bermasalah”.

Definisi tersebut menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah upaya dalam membantu orang-orang yang bermasalah dengan mencari jalan keluar permasalahan yang telah dirancang berdasarkan kebutuhan.

### Tujuan Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial selain merupakan suatu ilmu dibidang sosial yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat dan juga keberfungsian sosialnya, kesejahteraan sosial juga memiliki tujuan umum. Dikutip dalam Fahrudin (2012:10) Tujuan kesejahteraan sosial adalah:

1. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
2. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

Dari pengertian diatas dapat diartikan tujuan pekerjaan sosial ialah dapat meningkatkan dan mengembangkan taraf hidup manusia yang lebih memuaskan, dimana dapat memenuhi semua kebutuhannya baik kebutuhan pokok, pangan, sandang dan papan, kesehatan dan juga mampu menjalin hubungan yang baik dengan individu maupun kelompok di lingkungannya. Menurut Schneiderman (1972) dikutip dalam Fahrudin (2014;10) mengemukakan “tiga tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial yang sampai tingkat tertentu tercermin dalalam semua program kesejahteraan sosial, yaitu pemeliharaan sistem, pengawasan sistem dan perubahan sistem”. Berikut penjelasan mengenai tiga tujuan tersebut.

1. Pemeliharaan Sistem

Pemeliharaan dan menjaga keseimbangan atau kelangsungan keberadaan nilai-nilai dan norma sosial serta aturan-aturan kemasyarakatan dalam masyarakat, termasuk hal-hal yang bertalian dengan definisi makna dan tujuan hidup; motivasi bagi kelangsungan hidup orang seorang dan kelompok; norma-norma yang menyangkut pelaksanaan peranan anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua, dam peranan pria dan wanita; norma-norma yang berhubungan dengan produksi dan distribusi barang dan jasa; norma-norma yang berhubungan dengan penyelesaian konflik dalam masyarakat, dan lain-lain.

1. Pengawasan Sistem

Melakukan pengawasan secara efektif terhadap perilaku yang tidak sesuai atau menyimpang dari nilai-nilai dasar sosial. Kegiatan-kegiatan kesejahteraan sosial untuk mencapai tujuan semacam itu meliputi; mengintensifkan fungsi-fungsi pemeliharaan berupa kompensasi, (re) sosialisasi, peningkatan kemampuan menjangkau fasilitas-fasilitas yang ada bagi golongan masyrakat yang memperlihatkan penyimpangan tingkah laku.

1. Perubahan Sistem

Mengadakan perubahan ke arah berkembangnya suatu sistem yang lebih efektif bagi anggota masyarakat. Dalam mengadakan perubahan itu, sistem kesejahteraan sosial merupakan instrumen untuk menyisihkan hambatan-hambatan terhadapa partisipasi sepenuhnya dan adil bagi anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan; pembagian sumber-sumber secara lebih pantas dan adil; dan terhadap penggunaan struktur kesempatan yang tersedia secara adil pula.

### Fungsi-Fungsi Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial selain memiliki tujuan untuk mencapai kehidupan yang layak bagi masyarakat, tentunya juga memiliki fungsi-fungsi yang sangat berkaitan erat dengan keberfungsian sosial. Dikutip dalam Fahrudin (2014:12) Fungsi-fungsi dalam kesejahteraan sosial antara lain:

1. Fungsi Pencegahan (*Preventive*)

Kesejahteraan sosial ditunjukkan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru.

1. Fungsi Penyembuhan (*Curative*)

Kesejahteraan sosial ditunjukkan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketikmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitasi).

1. Fungsi Pengembangan (*development*)

Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.

1. Fungsi Penunjang (*Supportive*)

Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial lainnya.

Berdasarkan uraian mengenai fungsi-fungsi kesejahteraan sosial dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan sosial memiliki empat fungsi, yaitu fungsi pencegahan, fungsi penyembuhan, fungsi pengembangan, dan fungsi penunjang. Dimana keempat fungsi tersebut sangat berkaitan erat dengan keberfungsian sosial individu, kelompok maupun masyarakat.

Pada umumnya fungsi-fungsi kesejahteraan sosial ini bertujuan untuk menanggulangi masalah-masalah yang dihadapi oleh individu, keluarga dan masyarakat yang tidak dapat berfungsi menjadi berfungsi kembali secara wajar dan dapat menjalankan tanggung jawabnya di lingkungan masyarakat.

### 2.1.4 Komponen Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial selain memiliki tujuan dan fungsi yang sangat penting bagi yang mempelajarinya, yaitu adanya komponen-komponen yang tidak kalah jauh pentingnya. Komponen-komponen tersebut menjadi suatu pembeda antara bidang kesejahteraan sosial dengan bidang lainnya. Dikutip dalam Fahrudin (2014:16) Komponen-komponen kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

1. Organisasi Formal

Usaha kesejahteraan sosial terorganisasi secara formal dan dilaksanakan oleh organisasi atau badan sosial yang formal pula.

1. Pendanaan

Tanggung jawab dalam kesejahteraan sosial bukan hanya tanggung jawab pemerintah melainkan juga tanggung jawab masyarakat.

1. Tuntutan kebutuhan manusia

Kesejahteraan sosial harus memandang kebutuhan manusia secara keseluruhan, dan tidak hanya memandang manusia dari satu aspek saja. Hal inilah yang membedakan pelayanan kesejahteraan sosial dengan yang lainnya. Pelayanan kesejahteraan sosial diadakan karena tuntutan kebutuhan manusia.

1. Profesionalisme

Pelayanan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara professional berdasarkan kaidal ilmiah, terstruktur, sistematik, dan menggunakan metoda dan teknik-teknik pekerjaan sosial dalam praktiknya

1. Kebijakan Pelayanan

kesejahteraan sosial harus ditunjang oleh seperangkat perundang-undangan yang mengatur syarat memperoleh, proses pelayanan dan pengakhiran pelayanan.

1. Peran serta masyarakat

Usaha kesejahteraan sosial harus melibatkan peran serta masyarakat agar dapat berhasil dan memberi manfaat kepada masyarakat.

1. Data dan informasi kesejahteraan sosial

Pelayanan kesejahteraan sosial harus ditunjang dengan data dan informasi yang tepat. Tanpa data dan informasi yang tepat maka pelayanan akan tidak efektif dan tidak tepat sasaran.

### 2.1.5 Bidang Kesejahteraan Sosial

Bidang usaha kesejahteraan sosial disebut juga sebagai praktik pekerjaan sosial, terdiri dari berbagai cakupan yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Menurut Fahrudin (2012:11) bidang-bidang pelayanan kesejahteraan sosial antara lain:

* + - 1. Kesejahteraan anak dan keluarga.
      2. Kesejahteraan remaja dan generasi muda.
      3. Kesejahteraan orang lanjut usia.
      4. Pelayanan kesejahteraan sosial umum (*public social welfare services).*
      5. Pelayanan rekreasional.
      6. Pelayanan sosial koreksional.
      7. Pelayanan kesehatan mental.
      8. Pelayanan sosial medis.
      9. Pelayanan sosial bagi penyandang cacat.
      10. Pelayanan sosial bagi wanita.
      11. Pelayanan sosial perumahan dan lingkungan.

Berdasarkan pengertian di atas, secara garis besar bidang-bidang pelayanan kesejahteraan sosial atau bidang usaha kesejahteraan merupakan berbagai macam pelayanan guna menanggulangi berbagai macam permasalahan sosial yang sering dihadapi dalam kehidupan masyarakat pada umumnya.

### 2.1.6 Usaha Kesejahteraan Sosial

Usaha kesejahteraan sosial pada umumnya disebut pelayanan sosial seperti yang dikemukakan oleh Jones (1990) dalam Soeharto (2010:8): “Tujuan utama usaha kesejahteraan sosial yang pertama dan utama adalah penanggulangan kemiskinan dalam berbagai manifestasinya.” Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa kemiskinan yang menjadi sumber permasalahan sosial lainnya merupakan aspek yang menjadi tujuan utama usaha kesejahteraan sosial untuk mengatasinya.

## 2.2 Tinjauan Tentang Pekerjaan Sosial

### 2.2.1 Pengertian Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial merupakan Profesi yang memberikan pertolongan pelayanan sosial kepada individu, kelompok dan masyarakat dalam peningkatan keberfungsian sosial mereka dan membantu memecahkan masalah-masalah sosial mereka sehingga mampu menjalankan peranan sosialnya. Adapun pengertian dari pekerjaan sosial menurut Zastrow yang di kutip oleh Suharto, (2014: 24) adalah: “Aktivitas profesional untuk menolong individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut”.

Pekerjaan sosial merupakan pekerjaan professional yang memiliki tujuan utama untuk menciptakan kondisi individu, kelompok atau masyarakat yang lebih sejahtera sehingga mereka dapat berfungsi sosial dengan baik, dimana pekerjaan sosial ini didasarkan oleh tiga komponen yaitu kerangka pengetahuan *(body of knowledge)*, kerangka keahlian *(body of skill)* dan kerangka nilai *(body of values)*.

Menurut definisi diatas bahwa pekerja sosial professional dapat membantu memecahkan masalah individu, kelompok dan masyarakat untuk meningkatkan keberfungsian klien sehingga mampu menjalankan peran sosialnya. Menurut Asosiasi Nasional Pekerja sosial amerika (NASW) dalam Zastrow Fahrudin(2012:60) menyatakan bahwa pekerja sosial adalah :

*“Social work is profesional activity of having individuals, groups, or communities to echance or restore their capacity for social functioning and to creat societal conndition favorable to their goals. Social work practice consists of the profesional application of social work value, principle, and techniques to one or more of the following ends: helping people obtain tangible services, providing counselling and psychotheraphy for individual, families, and groups; helping communities or group provide or improve social and health services; and participating in the relevant legislative processes. The pratice of social work requires knowledge of human development and behavior; of social economic, and culture institutions; and of the interection all of these factors.”*

Pekerjaan sosial adalah aktivitas profesional memiliki individu, kelompok, atau masyarakat untuk echance atau mengembalikan kapasitas mereka untuk berfungsi sosial dan menciptakan kondisi sosial yang menguntungkan untuk tujuan mereka. Praktek pekerja sosial terdiri dari aplikasi profesional dari nilai sosial kerja, prinsip, dan teknik untuk satu atau lebih ujung berikut: membantu orang mendapatkan pelayanan yang nyata, memberikan konseling dan *psychotheraphy* bagi individu, keluarga, dan kelompok; membantu masyarakat atau kelompok memberikan atau meningkatkan pelayanan sosial dan kesehatan; dan berpartisipasi dalam proses legislatif yang relevan. Praktik pekerja sosial membutuhkan pengetahuan tentang perkembangan manusia dan perilaku; lembaga sosial ekonomi, dan budaya; dan dari interection semua faktor ini.

Dari uraian di atas menjelaskan bahwa pekerja sosial adalah aktivitas profesional yang bertujuan untuk membantu mengembalikan keberfungsian individu, kelompok dan masyarakat. Praktek pekerja sosial mempunyai nilai, metode, ilmu dan prinsip-prinsip dalam melakukan pelayanan-pelayanan sosial. Dalam menangani permasalahan klien, pekerja sosial akan mengadakan serangkaian kegiatan intervensi atau proses pertolongan, yang pada hakekatnya merupakan semua tindakan pekerja sosial yang diarahkan kepada beberapa bagian sistem sosial dengan tujuan mengadakan perubahan dalam sistem tersebut. Dengan demikian pekerja sosial dalam praktiknya harus mampu memahami tentang makna dan dasar dari pengetahuan mengenai pekerjaan sosial itu sendiri, serta mampu memiliki kemahiran dalam menerapkan pengetahuan, metode-metode dan teknik tertentu yang berlandaskan pada nilai-nilai serta etika yang sesuai.

### 2.2.2 Fungsi Dasar Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial merupakan suatu aktivitas profesional untuk membantu individu, kelompok maupun masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi mereka. Untuk mencapai hal tersebut, pekerjaan sosial memiliki fungsi dasar pekerjaan sosial. Fungsi dasar pekerjaan sosial menurut Max Siporin (1975) dikutip dalam Huraerah (2008;39) yaitu:

1. Pelayanan akses (*access services*), mencakup pelayanan informasi, rujukan, advokasi, dan partisipasi. Tujuannya membantu orang agar bisa mencapai atau menggunakan pelayanan-pelayanan yang tersedia.
2. Pelayanan Terapis, pertolongan, dan rehabilitasi, termasuk di dalamnya perlindungan dan perawatan pengganti, seperti pelayanan yang diberikan oleh badan-badan yang menyediakan konseling, pelaynanan kesejahteraan anak, pelayanan pekerjaan sosial medis dan sekolah, program-program koreksional, perawatan bagi orang-orang usia lanjut (jompo) dan sebagainya.
3. Pelayanan sosialisasi dan pengembangan, seperti tempat penitipan bayi/anak, KB (Keluarga Berencana), pendidikan keluarga, pelayanan rekreasi bagi pemuda, pusat kegiatan masyatakat dan sebagainya.

Dari uraian diatas menjelaskan bahwa pekerjaan sosial tersebut dengan memberikan pelayanan sosial kepada individu, kelompok maupun masyarakat dengan membantu mereka untuk mencegah atau memperbaiki masalah-masalah sosial yang terjadi, dan juga meningkatkan kehidupan mereka.

### 2.2.3 Tujuan Pekerjaan Sosial

Pekerjaan Sosial didalam menjalankan kegiatan profesionalnya memusatkan perhatiaanya pada keberfungsian sosial individu, kelompok maupun masyarakat. Pekerjaan sosial adalah profesi pertolonga dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan sosial baik individu, kelompok maupun masyarakat dan membantu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dengan perhatian khusus pada orang-orang yang tertindas, rawan dan miskin. Tujuan praktik pekerjaan sosial menurut Pujileksono dkk (2018;19) yaitu meliputi:

1. Mengembangkan kemampuan sesorang dalam pemecahan masalah.
2. Menghubungkan orang dan sistem sehingga dapat menyediakan sumber, pelayanan dan kesempatan.
3. Meningkatkan efektivitas operasional sistem secara manusiawi.
4. Memberikan kontribusi pada pengembangan dan penyempurnaan perumusan dan implementasi kebijakan sosial.

Tujuan lain dari pekerjaan sosial menurut Zastrow (2008) dikutip dalam Fahrudin (2014;67) juga menambahkan empat tujuan lagi yang dikemukakan oleh *Council on Social Work Education* (CSWE) sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan manusia dan mengurangi kemiskinan, penindasan, dan bentuk-bentuk ketidakadilan sosial lainnya.
2. Mengusahakan kebijkan, pelayan dan sumber-sumber melalui advokasi dan tindakan-tindakan sosial dan politik yang meningkatkan keadilan sosial dan ekonomi
3. Mengembangkan dan menggunakan penelitian, pengetahuan dan keterampilan yang memajukan praktik pekerjaan sosial.
4. Mengembangkan dan menerapkan praktik dalam konteks budaya yang bermacam-macam.

Tujuan pekerjaan diatas adalah untuk membantu dan memperbaiki individu, kelompok maupun masyarakat yang mengalami masalah agar mereka memahami kondisi dan kenyataan yang dihadapinya dengan cara meningkatkan kemampuan untuk menyelesaikan tugas-tugas kehidupannya dalam mengatasi permasalahan yang dihadapinya.

### Peranan Pekerjaan Sosial

Pekerja sosial memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu klien dalam penyesuaian masalahnya sehingga terpenuhi keberfungsian sosialnya sebagai suatu kewajiban dari sebuah profesi pekerjaan sosial. Menurut Sukoco (2011:22) menyatakan peranan pekerjaan sosial adalah:

1. Sebagai pemercepat perubahan (*enabler*)

Sebagai *enabler*, seorang pekerja sosial membantu individu-individu, kelompok-kelopok dan masyarakat dalam mengakses sistem sumber yang ada, mengidentifikasi masalah dan mengembangkan agar kapasitasnya agar mengatasi masalah untuk pemenuhan kebutuhannya.

1. Peran sebagai perantara (*broker*)

Peran sebagai perantara yaitu menghubungkan individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat dengan lembaga pemberi pelayanan masyarakat dalam hal ini: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, serta Pemerintah, agar dapat memberikan pelayan kepada individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat yang membutuhkan bantuan atau pelayanan masyarakat.

1. Pendidik (*educator*)

Dalam menjelaskan peran sebagi pendidik, community worker diharapkan mempunyai kemampuan menyampaikan informasi dengan baik dan benar serta mudah diterima oleh individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat yang menjadi sasaran perubahan.

1. Tenaga ahli (*expert*)

Dalam berkaitan sebagai tenaga ahli, pekerja sosial dapat memberikan masukan, saran, dan dukungan informasi dalam berbagai area (individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat)

1. Perencana sosial (*social planner*)

Seseorang perencana sosial mengumpulkan data mengenai maslaah sosial yang dihadapi individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat, menganalisa dan menyajikan alternative tindakan yang rasional dalam mengakses sistem sumber yang ada untuk mengatasi masalah-masalah pemenuhan kebutuhan individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat.

1. Fasilitator

Pekerja sosial sebagai fasilitator, dalam peran ini berkaitan dengan menstimulasikan atau mendukung pengembangan masyarakat. Peran ini dilakukan untuk mempermudah proses perubahan individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat, menjadi katalis untuk bertindak dan menolong sepanjang proses pengembagan dengan menyediakan waktu, pemikiran dan sarana-sarana yang dibutuhkan dalam proses tersebut.

### Metode Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial dalam kegiatannya berpedoman pada metode-metode professional sehingga tercapainya tujuan yang diharapkan. Dalam melaksanakan peran ini pekerja sosial mengunakan metode-metode seperti yang dikemukakan Muhidin (1992:10), yaitu sebagai berikut:

* 1. Metode Bimbingan sosial Perseorangan ( Social Case Work)

Bimbingan sosial Perseorangan adalah seni untuk membantu individu dalam mengembangakan dan mengunakan kemampuan pribadinya untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi di dalam lingkungan sosial.

* 1. Metode Bimbingan Sosial Kelompok (Group Work)

Bimbingan Sosial Kelompok adalah suatu metode dimana individu-individu di dalam kelompok dari suatu lembaga sosial dibantu oleh seorang pekerja atau petugas yang membimbing interaksi mereka dalam program-program kegiatan sehingga mereka dapat menghubungkan pengalaman selaras dengan kebutuhan dan kemampuan mereka untuk tujuan mengembangkan individu, kelompok dan masyarakat.

* 1. Metode Bimbingan Sosial Masyarakat (Community Organization)

Bimbingan sosial Masyarakat untuk kesejahteraan sosial adalah suatu usaha untuk melaksanakan dan mempertahankan penyesuian timbal balik yang efektif anatar sumber-sumber kesejahteraan sosial dan kebutuhan-kebutuhan kesejahteraan sosial.

### Tahapan Pekerjaan Sosial

Pekerja sosial dalam upaya membantu atau menolong individu, kelompok, atau masyarakat untuk bias memecahkan pernasalahan yang dihadapi mereka, terdapat prosedur intervensi yang harus dilalui oleh pekerja sosial dengan klien agar pemecahan permasalahan dan pemenuhan kebutuhan tersebut bias sesuai dengan yang mereka hadapi dan butuhkan. Berkaitan dengan proses intervensi pekerjaan sosial menurut Iskandar (2013;65) sebagai berikut:

1. Tahap Engagement,Intake, dan Kontrak

Tahap pertama pekerja sosial bertemu dengan klien untuk bertukar informasi yang dibutuhka, jenis pelayanan apa yang bisa diberikan oleh pekerja sosial untuk membantu memenuhi kebutuhan klien atau memecahkan masalah klien, lalu akan terjadi proses saling mengenal kemudian terciptalah kontak.

1. Tahap Assesment

Pada tahap selanjutnya merupakan proses pengungkapan dan pemahaman masalah yang dihadapi klien meliputi; bentuk masalah, ciri-ciri masalah, ruang lingkup masalah, faktor penyebab dan akibat serta pengaruh masalah dapat ditetapkan fokus atau akar masalah klien.

1. Tahap Planning

Pada tahap rencana intervensi dirumuskan oleh pekerja sosial yang meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memecahkan masalah klien, apa tujuan pemecahan masalah, siapa sasarannya serta bagaimana cara memecahkan masalah tersebut di masa mendatang.

1. Tahap Intervention

Pada tahap ini pekerja sosial memulai melaksanakan program kegiatan pemecahan masalah klien yang sudah direncanakan sebelumnya, dan pekerja sosial mengharapkan bahwa klien dapat mengikuti proses pemecahan masalah secara aktif.

1. Tahap Evaluation

Pada tahap ini merupakan tahap pengevaluasian terhadap kegiatan intervensi yang telah dilakukan, hal ini dimaksudkan untuk melihat tingkat keberhasilan, kegagalannya atau hambatan yang dialami oleh klien pada pemecahan masalahnya.

1. Tahap Terminasi

Tahap ini merupakan tahap pengakhiran atau pemutusan kegiatan intervensi, hal ini dilakukan bila tujuan intervensi telah tercapai atau permintaan klien sendiri atau karena faktor-faktor eksternal yang lebih baik klien dialihkan ke lembaga-lembaga atau tenaga ahli yang lebih berkompeten.

## 2.3 Tinjauan Tentang Pelayanan Sosial

### 2.3.1 Pengertian Pelayanan Sosial

Kesejahteraan sosial mencakup pelayanan-pelayanan sosial yang terdapat di masyarakat agar terjalin sebuah keberfungsian sosial (*social functioning*) seseorang baik secara secara baik individu maupun kelompok pelayanan sosial diberikan untuk membantu individu ataupun kelompok mencari alternativ penyelesaian masalah yang dihadapi. Pelayanan sosial menurut Huraerah (2011 : 45) adalah :

Pelayanan sosial yaitu kegiatan terorganisasi yang ditunjukan untuk membantu warga negara yang mengalami permasalahan sebagai akibat ketidak mampuan keluarga melaksanakan fungsi-fungsinya. Kegiatan ini antara lain berupa pelayanan sosial bagi anak (termasuk balita dan remaja) serta lanjut usia terlantar atau mengalami berbagai bentuk kecacatan.

Ditinjau dari definisi tersebut pelayanan sosial merupakan suatu kegiatan yang terorganisir yang bertujuan untuk membantu individu-induvidu dalam masyarakat yang memiliki permasalahan sosial agar mereka dapat melaksakan fungsi-fungsi sosialnya, adapun pelayanan sosial diberikan kepada berbagai bidang kesejahteraan sosial seperti pelayanan sosial kepada anak, kepada remaja, kepada lanjut usia dll.

Pelayanan sosial merupakan aksi atau tindakan untuk mengatasi masalah sosial. Pelayanan sosial dapat diartikan sebagai seperangkat program yang ditunjukan untuk membantu individu, atau kelompok yang mengalami hambatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun definisi pelayanan sosial menurut Kahn yang dikutip oleh Fahrudin (2012 : 52) bahwa :

Pelayanan sosial dapat ditafsirkan dalam konteks kelembagaan sebagai terdiri atas program-program yang disediakan berdasarkan kriteria untuk menjamin tingkatan dasar dari penyediaan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dan keberfungsian individu, untuk memudahkan akses pada pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga pada umumnya, dan untuk membantu mereka yang berada dalam kesulitan dan kebutuhan.

Berdasarkan definsi di atas bahwa adanya penyelenggara pelayanan sosial berupa kegiatan-kegiatan terorganisir berupa pemberian jasa yang bertujuan untuk memulihkan, memelihara dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, kelompok, dan masyarakat agar mampu menjalankan fungsi sosial yang layak. Adanya penyelenggara pelayanan sosial kepada warga yang bertujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan keberfungsian sosial seseorang agar kembali seperti biasanya. Pelayanan sosial tersebut dapat berupa pelayanan bagi anak dan balita, pelayanan lansia, dan pelayanan untuk kecacatan.

### 2.3.2 Fungsi Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial diadakan untuk melindungi, mengadakan perubahan atau menyempurnakan kegiatan-kegiatan pendidikan, asuhan anak, penanaman nilai, dan pengembangan hubungan sosial yang di masa lampau menjadi fungsi keluarga, lingkungan tetangga, dan kerabat. Menurut Muhidin (1997:41) menjelaskan tentang fungsi-fungsi pelayanan sosial sebagai berikut :

1. Peningkatan kondisi kehidupan masyarakat
2. Pengembangan sumber-sumber manusiawi
3. Orientasi masyarakat terhadap perubahan-perubahan sosial dan penyesuaian sosial
4. Mobilitas dan pencipta sumber-sumber masyarakat untuk tujuan pembangunan
5. Penyedian dan penyelenggara struktur kelembagaan untuk tujuan agar pelayanan-pelayanan yang terorganisir dapat berfungsi.

Menurut definisi diatas Pelayanan sosial merupakan aktivitas yang mempunyai misi membantu individu, kelompok, ataupun khalayak umum agar mereka mampu memenuhi kebutuhan-kebetuhannya, yang pada akhirnya mereka diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang ada melalui tindakan-tindakan kerjasama ataupun melalui pemanfaatan sumber-sumber yang ada dimasyarakat untuk memperbaiki kondisi kehidupannya.

Pelayanan sosial merupakan pelayanan yang memberikan bantuan kepada individu, kelompok, dan masyarakat dalam mengatasi masalah sosial baik dari luar maupun dari dirinya. Pelayanan sosial bertujuan untuk meningkatkan kemampuan orang dalam memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia. Sedangkan pelayanan menurut Kahn (1979) yang dikutip oleh Fahrudin (2012:52), yaitu:

“Pelayanan sosial dapat ditafsirkan dalam konteks kelembagaan sebagai terdiri dari atas program-program yang disediakan berdasarkan kriteria pasar untuk menjamin tingkatan dasar dari penyediaan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan untuk memudahkan akses pada pelayanan-pelayanan dan kelembagaan-kelembagaan pada umumnya dan untuk membantu mereka yang berada dalam kesulitan dan kebutuhan”.

Berdasarkan definisi di atas pelayanan sosial merupakan bantuan dari program-program yang tersedia untuk memberikan pelayanan-pelayanan untuk membantu individu, kelompok dan masyarakat yang berada dalam kesulitan dan kebutuhan, tetapi dipilih berdasarkan kriteria. Kriterian pemberian pelayanan sosial bukan berdasarkan kriteria pasar, artinya tidak berdasarkan kriteria kemampuan orang untuk membayar, pemberian pelayanan didasrkan pada kebutuhan seseorang.

## 2.4 Tinjauan Tentang Sikap

### 2.4.1 Pengertian Sikap

Sikap menjadi salah satu hal yang paling penting, yang paling dilihat karena dalam sikap seperti interaksi dengan orang lain, tingkah laku saat kita ada dalam lingkungan masayarakat/komunitas, menjadi penilaian seseorang bahwa kita baik/tidak. Sikap didefinisikan oleh Azwar (2013:7) menjelaskan yang mendasari orang berperilaku menjadi tiga komponen yang saling menunjang, yaitu: 1. Kognitif, menyangkut pengetahuan yang biasanya digunakan dalam proses berfikir; 2. Afektif, menyangkut kehidupan emosional seseorang yang mewarnai pengetahuan serta gagasan yang terdapat dalam komponen kognitif yang meliputi nilai rasa baik atau tidak baik, suka atau tidak suka; 3. Konatif, merupakan kecendrungan untuk bertingkah laku dengan cara tertentu terhadap suatu keadaan.

Dapat dilihat bahwa dari definisi tersebut, suatu sikap mengandung tiga komponen, yakni (1) komponen kognitif (keyakinan); (2) komponen afektif (emosi/ perasaan); dan (3) komponen perilaku (tindakan). Komponen kognitif merupakan refresentasi apa yang dipercayai oleh individu pemilik sikap; komponen afektif merupakan perasaan yang menyangkut aspek emosional, sedangkan komponen perilaku atau konatif merupakan aspek kecenderungan beprilaku tertentu sesuai dengan sikap yang dimiliki oleh seseorangan.

Menurut Sarwono (2009:201) mengemukakan bahwa: “Sikap *(attitude)* adalah istilah yang mencerminkan rasa senang, tidak senang atau perasaan biasa-biasa saja *(netral)* dari seseorang terhadap sesuatu dan sesuatu itu dapat berupa benda, situasi, orang-orang atau kelompok”.

Berdasarkan definisi di atas, bahwa sikap merupakan cerminan dari perasaan sesorang yang hasilnya dapat berbeda – beda, seperti senang , tidak senang atau biasa saja, dan hal tersebut dapat membantu untuk memahami karakter dan tingkah laku manusia terhadap sesuatu ataupun sesorang.

### 2.4.2 Ciri – ciri Sikap

Ciri-ciri dari sikap menurut Sarwono (2009:203) yang dijelaskan didalam bukunya untuk membedakan dari fungsi psikis yang lain seperti; set, motif, kebiasaan, pengetahuan, dan lain-lain perlu dikemukakan ciri-ciri sikap sebagai berikut:

1. Dalam sikap selalu terdapat hubungan subjek-objek,
2. Tidak ada sikap yang tanpa objek,
3. Objek sikap bisa berupa benda, orang, kelompok orang, nilai-nilai sosial, pandangan hidup, hukum, lembaga masyarakat dan sebagainya,
4. Sikap bukan bakat atau bawaan sejak lahir, melainkan dipelajari dan dibentuk melaui pengalaman-pengalaman”.

Menurut Jalaluddin Rakhmat (1992:39) yang dijelaskan didalam bukunya diantaranya adalah :

1. Sikap adalah kecenderungan seseorang untuk bisa bertindak, berpikir dan juga merasa bahwa dirinya paling baik dalam menghadapi objek, ide dan juga situasi ataupun nilai. Sikap bukanlah perilaku menurut Jalaluddin namun kecenderungan untuk perilaku dengan menggunakan metode tertentu saja terhadap objek sikap. Objek sendiri bisa berbentuk apa saja yakni orang, tempat, gagasan, ataupun situasi dalam kelompok.
2. sikap memiliki daya penolong atau motivasi yang bisa dianggap sesuai ataupun tepat. Sikap bukan hanya sekedar rekaman dari kejadian yang sudah dilewati atau sudah berlalu. Tetapi,sikap bisa menentukan apakah orang harus berpihak pada suatu hal ataupun menjadi seseorang yang memiliki sisi minus atau plus dalam diri, selain itu sikap menentukan apa yang disukai, diharapkan, dan diinginkan, serta lebih sering mengesampingkan apa yang tidak diinginkan, dan apa yang harus mereka hindari atau tidak disukai.
3. sikap cenderung lebih menetap. Berbagai studi menunjukkan sikap politik kelompok cenderung dipertahankan dan jarang mengalami pembahan, karena itulah sikap jarang berubah.
4. Sikap bisa dijadikan bahan evaluatif untuk seseorang, dimana sikap mungkin bisa menjadi hal tersebut bisa menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Karena itulah sikap seringkali membuat seseorang menjadi defensif atau lebih terbuka.

Berdasarkan definisi di atas, bahwa sikap bukanlah bakat yang dibawa sejak lahir, melainkan bisa dipelajari dari pengalaman pengalamannya, sehingga sikap mempunyai kecenderungan bertindak sesuai apa yang dirasakannya dan membentuk suatu sikap.

### 2.4.3 Proses Terbentuknya Dan Perubahan Sikap

Proses terbentuknya sikap yang dijelaskan menurut Sarwono (2009:203) didalam bukunya bahwa sikap dapat terbentuk atau berubah melalui empat macam cara yaitu, adopsi, diferensiasi, integrasi, dan trauma berikut adalah penjelasan dari perubahan sikap:

1. Adopsi: kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa yang terjadi berulang-ulang dan terus-menerus, lama kelamaan secara bertahap diserap ke dalam diri individu dan mempengaruhi terbentuknya suatu sikap.
2. Diferensiasi: dengan berkembangnya intelegensi, bertambahnya pengalaman, sejalam dengan bertambahnya usia, maka ada hal-hal yang tadinya dianggap sejenis, sekarang dipandang tersendiri lepas dari jenisnya (terhadap objek tersebut dapat terbentuk sikap tersendiri).
3. Integrasi: pembentukan sikap disini terjadi secara berharap, dimulai dengan berbagai pengalaman yang berhubungan dengan satu hal tertentu sehingga akhirnya terbentuk sikap mengenai hal tersebut.
4. Trauma: adalah pengalaman yang tiba-tiba, mengejutkan, yang meninggalkan kesan mendalam pada jiwa orang yang bersangkutan (pengalaman yang traumatis dapat menyebabkan terbentuknya sikap).

Berdasarkan pengertian diatas, sikap sikap bias berubah-ubah sesuai pengalaman dan perasaan yang dirasakan seperti pengalaman,bertambahnya usia dan kejadian-kejadian yang terjadi berulang-ulang sehingga bisa mempengaruhi terbentuknya sikap seseorang.

### 2.2.4 Pengukuran sikap

Menurut beberapa ahli, sikap dapat diukur dengan menggunakan suatu alat yang dinamakan skala sikap. Diantaranya banyak skala sikap yang dikenal, ada dua skala sikap yang cukup banyak digunakan, yaitu skala sikap dari R. Likert (1933) yang dikutip oleh Sarwono (2009:207) bahwa: “Skala Likert merupakan daftar rencana pernyataan-pernyataan yang akan dijadikan pengukur diajukan dahulu kepada sejumlah responden yang ciri-cirinya mirip dengan sample yang akan diselidiki”. Pernyataan-pernyataan yang terpilih kemudian disusun dalam suat daftar dam responden diminta pendapatnya tentang pernyataan-pernyataan itu mulai dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Likert membagi skalanya ke dalam 5-7 kelas.

Salah satu aspek yang sangat penting guna memahami sikap dan perilaku manusia adalah masalah pengungkapan (assessment) dan pengukuran (measurement) sikap Azwar S, (2011:87) yaitu “Metode penskalaan Thrustone yang sering disebut sebagai metode interval tampak setara. Metode penskalaan pernyataan sikap ini dengan pendekatan stimulus yang artinya penskalaan dalam pendekatan ini ditujukan untuk meletakkan stimulus atau pernyataan sikap pada suatu kontinum psikologis yang akan menunjukkan derajat favourable atau tak favourable pernyataan yang bersangkutan”.

## Tinjauan Tentang Kegiatan Posyandu

### 2.5.1 Pengertian posyandu

Posyandu merupakan kegiatan dari oleh dan untuk masyarakat, tempat ini memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh lita kegiatan seperti pelayannan kegiataan kesehatan dasar, yaitu KB, KIA, GIZI, Imunisasi dan Penanggulangan Diare. Tujuan dari posyandu yaitu memelihara dan meningkatkan kesehatan dalam rangka mewujudkan kesehatan dan kesejahteraan keluarga, meningkatkan kegotong royongan masyarakat serta sebagai tempat untuk saling memperoleh dan memberikan berbagai informasi. Posyandu dibentuk oleh kelompok masyarakat yang peduli tenteng kesehatan dan kesejahteraan masyarakat serta mendapat dukungan dari tokoh masyarakat setempat. Posyandu perlu di bantu bila mana terdapat kelompok-kelompok sasaran antara lain bayi, anak balita, ibu hamil, ibu menyusui, wanita usia subur dan pasangan usia subur.

Pembangunan dalam bidang kesehatan sebagai upaya untuk mengatasi dan mencegah berbagai masalah kesehatan yang dialami oleh ibu dan anak dapat berupa pelaksanaan Program Posyandu. Program Posyandu menurut (Kementrian Kesehatan RI; Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal Posyandu), 2011) :

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Manusia (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Berdasarkan definisi diatas menjelaskan bahwa posyandu kegiatan dari oleh dan untuk masyarakat, seperti pelayannan kegiataan kesehatan dasar, yaitu KB, KIA, GIZI, Imunisasi dan Penanggulangan Diare. Posyandu , guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

### 2.5.2 Langkah –langkah pembentukan kader

1. Kader melakukan pendapatan jumlah sasaran diwilayahnya.
2. Mengimformasikan kepada tokoh masyarakat,kepala desa,/kelurahan dan serta tokoh masyarakat tentang sepertinya di bentuk posyandu .
3. Menginformasikan kepada puskesmas untuk memperupayahkan diperolehnya dukungan para medis dan sarana teknis kegiatan posyandu timbangan,KMS,imunisasi dan obat obatan.
4. Memusawarakan untuk menetapkan lokasi posyandu,ketua kelompok kader,hari buka posyandu,kebutuhan pencatatan dan lain lain .
5. Menginformasikan kepada puskesmas dan sasaran

### Penyelangaraan kegiatan posyandu

Posyandu diselenggaraan oleh kader posyandu terlatih,yang berasal dari LSM,PKK tokoh masyarakat ,pemuda-pemudi dan lain lain dengan bimbingan puskesmas PLKB,PKK,LSM dan petugas lainnya.semua anggota masyarakat tentang bayi,anak balita,ibu menyusui,wanita subur dan Pasangan usia subur. Posyandu dapat diselenggarakan ditempat yang mudah dijangkau dan dikunjungi masyarakat serta ditentukan berdasarkan hasil masyawarah masyarakat ditempat,seperti dirumah penduduklain desa atau k,balai RT/RW.balai desa atau keseluruhan lingkungan pasar,pabrik kantor atau ditempat khusus yang dibangun masyarakat penyelenggaraan posyandu di selenggarakan sekurang-kurangan satu kali dalam sebulan.

### 2.5.4 Bentuk-bentuk pelayanan

* 1. Pelayanan minimal:
     1. Pelayanan gizi
     2. Kesehatan ibu dan anak
     3. Keluarga berencana
     4. Imunisasi
     5. Penanggulangan penyakit diare dan infeksi saluran penafasan
  2. Kegiatan tambahan sesuai dengan kebetuhan masyarakat setempat misalnya:
     1. Sarana air minumdan perbaikan lingkugan pemukiman.
     2. Perkembangan anak termasuk bina keluarga balita(BKB)
     3. Usaha kesehatan gizi masyarakat desa
     4. Sumber pembiayaan posyandu
     5. Sumber pembiayaan posyandu yaitu:

1. Dana kegamaan
2. Dana usaha
3. Bantuaan lain yang mengikat

### 2.5.5 Tinjauan Balita

Balita adalah anak yang berumur dibawah lima tahun. Menurut Harlock anak balita memiliki ciri-ciri yang sangat menonjol yaitu pertumbuhan dan perkembangannya baik itu pertubuhan fisik maupun perkembangan mental dan intelektual serta di perolehnya berbagai keterampalin yang antara lain anak pelajar menggunakan tangannya sehingga terampil, belajar menyeimbangkan diri dalam perjalanan,belajar berbicara dan melempar disamping itu anak merupakan berbagai macam keterampilan yang positif untuk dirinya sendiri dan bermain bersama anak-anak lain proses ini merupakan gagasan untuk hidupnya dikemudian hari.

Berdasarkan definisi diatas yaitu balita memiliki ciri yang menonjol dari pertumbuhan,perkembangannya seperti perubahan fisik dan perkembangan mental dan pikiran seperti belajar menyeimbangkan diri dalam perjalanan,belajar berbicara.

## 2.6 Tinjauan tentang Partisipasi

### 2.6.1 Pengertian partisipasi

Setiap manusia tentunya kewenangan untuk dapat melakukan kegiatan yang mereka inginkan. Namun, dibalik kewenangan tersebut tentunya mereka haruslah diiringi dengan persepsi yang baik dan juga sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang ada. Hal ini dikarenakan setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh masing-masing setiap orang haruslah memikirkan juga mengenai dampaknya, tentunya sangatlah perlu persepsi yang baik untuk dapat mendorong dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang positif sehingga tidak ada dampak yang buruk yang akan diterimanya nanti. Persepsi seseorang merupakan salah satu faktor yang mendukung seseorang untuk dapat berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Menurut Moeliono dalam Fahrudin (2012: 36) mendefinisikan partisipasi adalah “Bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela baik karena alasan-alasan dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan”.

Selain definisi tersebut, terdapat pula definisi partisipasi menurut Mubyarto (1985) dalam Fahrudin (2012: 37) yang mendefinisikan partisipasi adalah “Kesadaran untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri”.

Dari dua definisi diatas, Partisipasi adalah bentuk keiikutseraan masyarakat secara sukarela dalam suatu kegiatan yang dilakukan beramai-ramai seperti gotong royong. Semakin baik persepsi masyarakat maka semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi dalam suatu kegiatan tanpa adanya paksaan dan sesuai dengan keinginan diri sendiri. Semua itu tidak luput dari kesadaran masyarakat agar tercapainya suatu tujuan.

### 2.6.2 Manfaat Partisipasi

Berbagai pengertian partisipasi yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dijelaskan bahwasanya partisipasi merupakan suatu keterlibatan yang dilakukan dan juga tentunya diharapkan dapat bermanfaat dalam interaksi sosial di masyarakat. MenurutSuratmo (1992) dalam Fahrudin (2012: 41) Manfaat dari partisipasi yg akan dirasakan oleh masyarakat adalah :

1. Masyarakat mendapatkan informasi mengenai rencana pembangunan di daerahnya, sehingga dapat mengetahui dampak apa yang akan terjadi baik yang positif maupun yg negatif, dan cara menanggulangi dampak negatif yang akan dan harus dilakukan.
2. Masyarakat akan ditingkatkan pengetahuannya mengenai masalah lingkungan, pembangunan dan hubungannya, sehingga pemerintah dapat menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawabnya dalam pengelolaan lingkungan hidup.
3. Masyarakat dapat menyampaikan informasi dan pendapatnya atau persepsinya kepada pemerintah terutama masyarakat di tempat proyek yang akan terkena dampak.
4. Pemerintah mendapatkan informasi-informasi dari masyarakat yang belum tahu atau tidak ada dalam laporan amdal, sehingga kebijaksanaan atau keputusan yg akan diambil akan lebih tepat, karena di dalam informasi tersebut sering pemerintah dapat menemukan masalah-masalah yang penting bagi masyarakat yg belum terekam dalam laporan amdal secara jelas terutama hal-hal yang tidak dapat dikuantitatifkan.
5. Apabila masyarakat telah mengetahui cukup banyak mengenal proyek tersebut termasuk dampak apa saja yang akan terjadi positif dan negatif dan usaha-usaha apa saja yang akan dilakukan untuk mengurangi dampak negatif, sedang dari pihak pemerintah dan pemrakarsa proyek mengetahui pendapat-pendapat masyarakat serta keinginannya atau hal-hal apa yang diperlukan, sehingga salah paham atau terjadinya konflik dapat dihindari.
6. Masyarakat akan dapat menyiapkan diri untuk menerima manfaat yang akan dapat dinikmati dan apabila mungkin meningkatkan manfaat tersebut dampak positif dan ikut menekan atau mengahdirkan diri terkena dampak negatif.
7. Dengan ikut aktifnya masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup sejak tahap penyusunan andal, biasanya perhatian dan isntansi pemerintah yg bertanggung jawab dan pemrakarsa proyek pada masyarakat akan meningkat.

Berdasarkan definisi diatas, manfaat partisipasi yaitu eratnya bebersamaan sehingga menjadi semakin kompak, masyarakat smendapatkan informasi rencana pembangunan di daerahnya, masyarakat akan ditingkatkan pengetahuannya mengenai masalah lingkungan, masyarakat dapat menyampaikan pendapatnya kepada pemerintah dan Masyarakat akan dapat menyiapkan diri untuk menerima manfaat yang akan dapat dinikmati dan apabila mungkin meningkatkan manfaat tersebut dampak positif dan ikut menekan atau mengahdirkan diri terkena dampak negatif.

### 2.6.3 Faktor-Faktor dalam Partisipasi

Partisipasi yang terdapat dalam setiap orang tentunya terjadi dikarenakan adanya suatu persepsi ataupun pemikiran yang ada dalam dirinya. Selain itu, terdapat juga faktor-faktor dalam partisipasi. Menurut sahidu (1998) dalam Fahrudin (2012: 44) faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemauan masyarakat untuk berpartisipasi adalah :

1. Motif harapan
2. *Needs*
3. *Rewards*, dan
4. Penguasaan informasi.

Faktor yg memberikan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi adalah:

1. Pengaturan dan pelayanan
2. Kelembagaan
3. Struktur dan stratifikasi sosial
4. Budaya lokal
5. Kepemimpinan
6. Sarana dan prasarana.

Sedangkan untuk faktor yg mendorongnya adalah :

1. Pendidikan modal, dan
2. Pengalaman yang dimiliki.

### 2.6.4 Bentuk-bentuk Partisipasi

Keterlibatan seseorang dalam suatu kelompok masyarakat dapat dilihat melalui peran sertanya dalam kegiatan yang bentuknya beraneka ragam. Menurut Soelaiman dikutip kembali oleh Hurerah (2008:96) mengungkapkan lima bentuk partisipasi sosial, yaitu :

* 1. Partisipasi langsung dalam kegiatan bersama secara fisik dan tatap muka
  2. Partisipasi dalam bentuk iuran, uang atau barang. Dalam kegiatan partisipasi dana dan sarana sebaiknya datang dari masyarakat sendiri walaupun terpaksa diperlukan di luar, hanya bersifat sementara dan sebagai umpan.
  3. Partisipasi dalam bentuk dukungan
  4. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan
  5. Partisipasi representatif dengan memberikan kepercayaan dan madat kepada wakil-wakil yang duduk dalam organisasi panitia.

Menurut Hamijoyo dikutip oleh Huraerah (2008:97) mengemukakan bentuk-bentuk partisipasi individu dalam pembangunan, yaitu :

* + - * 1. Partisipasi buah pikiran
        2. Partisipasi buah tenaga
        3. Partisipasi keterampilan dan kemahiran
        4. Partisipasi sosial.

Berdasarkan definisi diatas, beliau mengemukakan beberapa dari bentuk dari partisipasi individu pembangunan bahwa partisipasi didalam suatu kelompok bisa dilakukan dalam berbagai hal yaitu buah pikiran atau ide – ide tentang suatu hal, partisipasi buah tenaga yang merupakan suatu bantuan dalam implementasi suatu objek, partisipasi keterampilan yaitu suatu kemampuan dalam bidang yang dikuasai yang mampu memberikan fungsi yang signifikan dan partisipasi social yang merupakan sebagai suatu konsep dalam [pengembangan masyarakat](https://id.wikipedia.org/wiki/Pengembangan_masyarakat), digunakan secara umum dan luas. Partisipasi adalah konsep sentral, dan prinsip dasar dari pengembangan masyarakat karena, di antara banyak hal, partisipasi terkait erat dengan gagasan HAM.

### 2.6.5 Pendekatan Mengenai Partisipasi

Partisipasi yang terdapat dalam masyarakat tentunya memiliki beberapa ketentuan-ketentuan sesuai dengan norma-norma maupun nilai-nilai yang berlaku. Menurut Bumberger dan Shams (1989) dalam Fahrudin (2012: 36) terdapat 2 pendekatan mengenai partisipasi, yaitu :

1. Partisipasi merupakan proses sadar tentang pengembangan kelembagaan dan pemberdayaan dari masyarakat yang kurang beruntung berdasarkan sumber daya dan kapasitas yang dimilikinya.
2. Partisipasi harus mempertimbangkan adanya intervensi dari pemerintah dan lsm, disamping peran serta masyarakat. Hal ini sangat pentng untuk implementasi proyek yang lebih efisien mengingat kualitas sumber daya dan kapasitas masyarakat tidak memadai.